

Media menduduki peran sentral dalam terciptanya kota komunikatif, yang mendorong bagi kualitas hidup di perkotaan. Dalam konteks ini, media bisa menjadi alternatif komunikasi. Demokrasi dalam proses pembangunan kota mengandaikan tersedianya sebuah ruang bagi partisipasi warga. Demokrasi, dengan demikian, bisa mengambil ruang “dalam” atau “melalui” media itu sendiri.

ISSN 1907-5979



working papers

LABORATORIUM SOSIOLOGI
FISIP UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA

Volume 3 Nomor 2, Juni 2011
ISSN: 1907-5979

“URBAN COMMUNICATION AUDIT “ UNTUK PENGUATAN HAK ASASI WARGA KOTA (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)

Bambang K. Prihandono
F. Anita Herawati

Jl. Babarsari no 6 Yogyakarta 55281 Indonesia
Kotak Pos 1086 Telp. +62-274-487711 ext.4420 Fax. +62-274-487748
Website: <http://fisip.uajy.ac.id/labsos> E-mail: kalab_sos@mail.uajy.ac.id

Tentang Laboratorium Sosiologi

Laboratorium Sosiologi, Program Studi Sosiologi, universitas Atma Jaya Yogyakarta didirikan pada tahun 1998. Letupan gagasan yang mendasarinya adalah keinginan untuk menerapkan teori dalam wujud kerja-kerja praktikum penelitian.

Seiring dengan dinamika dan perkembangan aktivitas, Laboratorium Sosiologi pun semakin menemukan posisi institusional dan fokus kegiatan. Secara institusional, Laboratorium Sosiologi adalah organisasi di bawah program studi yang berfungsi sebagai sistem pendukung bagi kegiatan "tri dharma" program studi Sosiologi, yaitu proses belajar-mengajar, penelitian dan pengabdian. Penerjemahan dari ketiga fungsi tersebut adalah kerja-kerja seperti pengumpulan data, praktikum penelitian, pembuatan film dokumenter, diskusi bulanan, seminar dan penerbitan. Secara khusus, sebagai bentuk pengaturan dan pendalaman akan aktivitas pengabdian, Laboratorium Sosiologi selalu pengedepankan kerja jejaring.

Dengan demikian, tak berlebihan kiranya jika keberadaan Laboratorium Sosiologi menjadi ujung tombak pengembangan sosiologi, baik ilmu maupun institusinya.

Volume 3 Nomor 2, 2011
ISSN: 1907-5979

**working
papers**
LABORATORIUM SOSIOLOGI
FISIP UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA

Ketua:
Y. Kunharibowo

Dewan Redaksi:
Andreas A. Susanto
Bambang K. Prihandono
E. Yuningtyas
St. Nindito
Suryo Adi Pramono
V. Lucinda
V. Sundari Handoko

Desain wajah dan isi:
CV. Eria Grafika

URBAN COMMUNICATION AUDIT UNTUK PENGUATAN HAK ASASI WARGA KOTA (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)

A. Pengantar

Perbincangan tentang masalah perkotaan saat ini semakin mendesak. Gempuran globalisasi, yang dibiakkan oleh kekuatan teknologi dan kepentingan ekonomi, adalah pemicu pergeseran desa menjadi kota di berbagai belahan bumi (Gottdiener dan Hutchison 2000: 11). Seperti diungkap Giddens (dalam wawancara dengan Hutton 1990), bahwa gurita kekuatan teknologi dan ekonomi mampu menyatukan perbedaan ruang dan waktu, sehingga manusia pun dipaksa hidup dalam sebuah dunia pengembaraan. Dunia pengembaraan itu, selain bermain dalam dunia imaji (Appadurai, 1998)¹, mengejawantah pada proses urbanisasi. Arus urbanisasi ini menciptakan pergeseran-pergeseran ketenagakerjaan, peluang kerja, pemukiman dan kultur. Khusus mengenai pemukiman misalnya, tak mengherankan kini 5,2 milyar penduduk dunia pun telah menempati kota ketimbang desa (Clark 1996: 1).

¹ Appadurai menyebut faktor pembangun globalisasi adalah *technoscapes*, *financescapes*, *mediascapes* dan *ideoscapes*. Lihat, Arjun Appadurai, "Globale Landschaften" dalam Ulrich Beck (ed.), *Perspektiven der Weltgesellschaft*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998.

Eksplanasi pergeseran menjadi kota adalah proses perubahan sosial pada aras global sekaligus lokal. Proses perjumpaan antara yang global dan konteks lokal menjadikan soal sungguh *jelimet*. Pada titik inilah perbincangan tentang persoalan kota-kota di Indonesia menjadi penting. Mengapa? Model pembangunan kota di Indonesia sampai kini masih jauh dari ideal. Kota-kota di Indonesia lebih menampilkan kekhaosan ketimbang keteraturan. Kota adalah rimba belantara di mana yang kuat mampu melenyapkan yang lemah. Imbasnya, hak-hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari warga kelas bawah sering terabaikan. Proses yang oleh Beck (1997: 101) diformulasikan sebagai situasi baru, *polarisierung und strafizierung der Weltbevoelkerung in globalisierte Reiche und lokalisierte Arme* (polarisasi dan stratifikasi penduduk dunia dalam globalitas kaum kaya dan lokalitas kaum miskin).

Perubahan sosial di tengah polarisasi dan stratifikasi sosial-ekonomi tidak hanya memicu konflik antara pihak pemerintah kota selaku pengambil keputusan politik dan warga kota, namun juga rentan memicu konflik sosial horisontal (bandingkan Hamelink 2008: 291-302). Konflik pertama bisa dilihat dalam konflik-konflik kepentingan antara pemerintah kota dan warga dalam urusan pemukiman, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Tipe konflik kedua bisa dijejak pada tegangan relasi, yang kadang meletus, antar etnis, agama, kelompok dan juga ras. *Dus*, jikalau diringkas, arus besar persoalan kota di Indonesia adalah perlindungan dan promosi tentang hak-hak asasi warga kota.

Pada sisi lain, situasi (potensi) konflik sosial tersebut menyembulkan persoalan moda komunikasi sosial-politik kota. Gumpert dan Drucker (2008: 196) secara ringkas

mendefinisikan bahwa kepedulian akan hak asasi adalah pembangunan kota yang memberi ruang partisipasi, ruang dialog, pengakuan akan perbedaan ras, etnik, kelompok, agama dan ras serta memberikan ruang bagi warga kota untuk mengoptimalkan kepentingan ekonomi, sosial dan budaya warga kota. Sistem komunikasi model ini, dengan demikian, kota mestilah mengembangkan ruang dan teknologi komunikasi media bagi terwujudnya ruang publik, dimana segala sesuatunya senantiasa bisa dengan adil didialogkan (Habermas dalam Garnham 2007: 1-15). Pemahaman seperti itu membawa asumsi bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan kota, dimana di dalamnya segala kebijakan publik (*public policy*), merupakan sebuah keharusan prosedur dan prinsip esensial pembangunan demokrasi. Hanya dengan moda komunikasi yang baik, maka akan tercipta perlindungan dan pembangunan hak asasi manusia warga kota.

Fokus kajian penelitian ini adalah mengeksplorasi sistem komunikasi yang dikembangkan sebuah kota dalam rangka perbaikan, perlindungan dan pengembangan hak asasi warga kota, khususnya dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara kategori waktu, penelitian ini akan memfokuskan pada pasca keruntuhan rezim Orde Baru. Argumen pertama adalah bahwa keruntuhan sebuah rezim otoritarian membawa perubahan-perubahan dalam dunia politik, sosial dan pula ekonomi. Perubahan itu niscaya disemangati oleh proyek de-otoritarianisme. Praktik de-otoritarianisme paling mudah dibaca pada kasus tata kelola pemerintahan, konsep desentralisasi atau otonomi daerah mengemuka dan menjadi arus baru bagi tata pemerintahan (lokal). Meski tidak secara langsung membahas relasi variabel proses otonomi daerah dan dampaknya, studi ini akan diletakkan pada konteks

tegangan perubahan-perubahan sosial perkotaan akibat keputusan politik lokal, kepentingan privat dan warga kota.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah ruang-ruang publik alternatif tersedia untuk pengembangan sistem komunikasi informal pada masyarakat kota?
2. Apakah ruang publik tersebut dapat menumbuhkan pemecahan permasalahan kolektif dan dialog warga sipil
3. Seberapa kaya keragaman aktivitas masyarakat dalam ruang publik tersebut, terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat?
4. Apakah sistem komunikasi tersebut terbuka untuk menumbuhkan ide-ide baru, memberikan masukan untuk pihak eksternal dan untuk dikritisi?

B. KOTA: PERDEBATAN TEORITIK.

B.1. Kota sebagai Arena Kontestasi Identitas

Pendekatan-pendekatan dalam analisis perkotaan dewasa ini kiranya dideterminasi oleh tradisi Chicago yang lebih memfokuskan pada tingkah laku manusia (*human ecology*)² dan tradisi politik-ekonomi yang mewarisi semangat Marxisme. Tradisi Chicago, dengan dipelopori oleh Park, menggagaskan bahwa fenomena sosial gayut dengan pola-pola spasial. Selain itu, mengembangkan perspektif

² Tradisi Chicago diwakili oleh tokoh-tokoh utama seperti Ernest Burgess, Robert Park, Roderick McKenzie dan Louis Wirth.

interaksionis dimana setiap individu dianggap bertingkah laku sosial dalam upaya penyesuaian terus-menerus dengan lokasi sosiospasial. Pendek kata para pemikir tradisi Chicago berusaha menganalisis pola-pola tingkah laku keseharian dalam sebuah dunia kota (Gottdiener dan Hutchison 2000: 115-119).

Seperti setiap kajian yang diwarnai oleh semangat (politik-ekonomi) Marxisme, perkembangan kota dalam terang tradisi politik ekonomi lebih menekankan proses kontradiksi-kontradiksi kepentingan politik-ekonomi akibat kapitalisme (Saunders 1999: 13-28). Tentu, tradisi politik ekonomi tidaklah menyuarakan nada tunggal, namun menampilkan pula keanekaragaman pendekatan. Sebutlah misalnya David Harvey yang banyak menganalisis bahwa perkembangan kota diproduksi dan dideterminasi oleh kepentingan-kepentingan kapital. Proses perkembangan kota, bagi Harvey, dideterminasi oleh konsentrasi dan sirkuit kapital yang bermain dalam ruang-ruang perkotaan (Gottdiener dan Hutchison 2000: 137-139). Gagasan ini kiranya segaris dengan pemikir marxis lain, Lefebvre. Filosof Perancis ini lebih menekankan bahwa kota tak hanya tumbuh dalam sirkuit kapital, namun juga menampilkan dimensi ideologinya. Ruang adalah politik. Ruang bukanlah objek keilmuan yang dapat dipisahkan dari ideologi atau politik. *Dus*, ruang lambat laun menjadi bermakna homogen sebab mengalami subordinasi oleh kepentingan uang dan kapital. Kota, bagi Lefebvre, menunjukkan tiga relasi konsep: ruang, dunia keseharian dan reproduksi relasi sosial. Dalam konteks global, relasi kapitalistik tampil dalam kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh ruang dan sosial (Saunders 1999: 158-159).

Pendekatan-pendekatan kajian perkotaan saat ini menghadapi problema yang demikian rumit jika diaplikasikan pada kasus dunia berkembang semacam Indonesia. Globalisasi yang juga bisa dibaca sebagai konsekuensi-konsekuensi dari penalaran dan praktik modernitas, dalam praktiknya ia menciptakan impak-impak yang tak terdeteksi atau tak teramalkan sebelumnya. Risiko adalah kata kunci untuk mendeskripsikan proses kerusakan atau beaya. Beck dalam bukunya *"Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne"* (1986) menyebut proses modernitas semacam itu sebagai "masyarakat risiko". Individuasi adalah proses sosial yang tak terelakkan, yang menghidupi dan dihidupi oleh roh modernitas. Spirit modernitas yang menyertai proses globalisasi tersebut kiranya juga menghantam dunia kehidupan warga masyarakat. Jika di negeri-negeri "pusat" terjadi proses individuasi yang luar biasa, demikian pula masyarakat negeri-negeri "peripheri" mengalami goncangan-goncangan luar biasa pada tatanan sosialnya. Periode transisi ini ditandai oleh proses *disembedding of social system*.³ Akibatnya, sistem komunikasi sosial masyarakat pada situasi yang khaotik dan pula semakin hilangnya "kepercayaan" institusional dan individual (cf. Luhman, 1999). Paparan ini membawa pada titik simpul pemahaman bahwa secara ekonomi-politik masyarakat sedang disatukan dan dikomando oleh konduktor kepentingan ekonomi, sedang pada sisi sosio-kultural masyarakat sedang menuju proses individualisasi, yang berciri multidimensional dan *polyzentris*.

³ Lebih detail, Giddens menyebut tiga sumber dinamika modernitas: the separation of time and space, the development of disembedding mechanisms, the reflexive appropriation of knowledge. Lihat, Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity*, Stanford-California, Stanford University Press, 1990.

Pada titik inilah analisis perkotaan memerlukan pendekatan komprehensif. Pendekatan sosiospasial yang berciri multidisiplin, menghindari reduksi pada satu pendekatan semacam tingkah laku atau jatuh pada ekstrimitas politik ekonomi. Pendekatan yang diperlukan, dengan demikian, adalah sebuah analisis yang menggabungkan analisis sosial, ekonomi, politik dan kultural dengan konstruksi ruang (Gottdiener dan Hutchison 2000).

Penyertaan ruang sebagai salah satu faktor konstruksi (tingkah laku) sosial-ekonomi, kiranya, segaris dengan gagasan Giddens (1984) tentang proses strukturasi. Struktur ruang, seperti halnya struktur waktu, adalah pembangun struktur-struktur masyarakat. Ruang turut serta membentuk sistem sosial, dimana reproduksi hubungan antara aktor dan struktur dikonstruksi dan diorganisir dalam tindakan praksis. Ruang pun bermakna sebagai penjalin sebuah tatanan (Löw 2001: 168-178). Dalam artian ini, mungkin akan lebih konkret jika meminjam konsepsi Bourdieu (1996: 126) tentang ruang sosial (*soziales Raum*), yang merupakan sinonim dengan konsep arena, dimana terdapat pola-pola relasi individu dan kelompok yang senantiasa berkontestasi.

B.2. Kota Komunikatif

Dalam konteks penelitian, maka pemahaman kajian sosiospasial akan menempatkan ruang-ruang kota sebagai arena bermain antar aktor: penguasa bisnis, pemerintah lokal dan masyarakat. Perkembangan kota, dengan demikian, akan ditentukan oleh dialektika kepentingan ekonomi-politik dan ruang. Maka, bagaimana ruang dikonstruksi dan bagaimana proses perubahan pemaknaan atas ruang menjadi penting untuk melihat perkembangan kota.

Kini, perkembangan kota pun bisa didefinisikan berdasar pada proses dialektika yang mengerucut pada identitas kota berbasis pada ideologi dan perspektif masa depan. Muncullah istilah "*the green city*" atau kota hijau, *the compact city*, kota regional, kota jaringan, kota dunia atau kota global dan kota virtual. Lebih jauh, Castells, (1991: 10) mengembangkan gagasannya tentang *the Rise of the Network Society* menjadi *the Informational City*, Kota informasi, dimana munculnya proses informasi menjadi inti, aktivitas fundamental dari efektivitas dan produktivitas segala proses produksi, distribusi, konsumsi dan manajemen. Kota pun berubah menjadi cair dalam kategori ruang dan waktu, serta pada saat bersamaan kekuatan informasi membawa perubahan sosial pada keragaman ruang urban dan gaya hidup. Terhadap proses itu, Pacione (2001 dalam Carpentier 2008: 238) meringkasnya, bahwa kota yang berbasis pada arus informasi, via teknologi media, mengubah pola relasi sosial dan struktur sosial.

Perbincangan soal moda komunikasi dalam kota pun melangkah jauh, memunculkan konsep kota komunikatif (*the communicative city*). Dirintis oleh Kunzman (1997 dalam Carpentier 2008: 239) dan dikembangkan-konkretkan oleh para pendukung *the Urban Communication Foundation* seperti Carpentier, Hammelink, Gumpert dan Drucker. Definisi tentang kota komunikatif, secara ringkas dapat dibaca dari paragraf Kunzmann (1997: 28 dalam Carpentier):

New information and communication technologies could and should be used more skillfully to meet local and regional information needs, and to supply regional residents with the kind of civic information they require to live comfortably in an active community. Both access to information and opportunities to use various communication technologies are required to initiate and

maintain critical discussions on the future of a city region, to create local identity and civic pride, and to enhance participation in and commitment to urban development.

Apa yang digagaskan oleh Kunzmann tersebut bisa dibaca sebagai dimensi sosial komunikasi dari pembangunan kota, dimana kota mestilah menyediakan ruang untuk diskusi, interaksi, dialog yang difasilitasi oleh beragam teknologi komunikasi. Selain itu, terlihat bahwa gagasan kota komunikatif tersebut senantiasa bersifat politis, bermuara pada sistem politik kota demokratis. Ruang komunikasi kota, dengan demikian, mendorong proses partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, aktifnya komunitas sebagai basis bagi kuatnya masyarakat kewargaan (*civil society*), dan terciptanya etika untuk diversitas serta keterbukaan ruang bagi komunikasi dengan aspek non-fisik.

Pada aras konkret, media menduduki peran sentral dalam terciptanya kota komunikatif, yang mendorong bagi kualitas hidup di perkotaan. Dalam konteks ini, media bisa menjadi alternatif komunikasi. Demokrasi dalam proses pembangunan kota mengandaikan tersedianya sebuah ruang bagi partisipasi warga. Demokrasi, dengan demikian, bisa mengambil ruang "dalam" atau "melalui" media itu sendiri. Partisipasi dalam media berkait dengan bagaimana proses dialektika warga kota mampu mencipta keputusan dalam produksi media; sedang melalui media ingin menunjukkan bahwa partisipasi gayut dengan bagaimana warga negara dapat berkomunikasi menyampaikan pandangan, merepresentasikan mereka sendiri, dan berdebat soal keputusan politik. Alternatif media pun menjadi simpul antara kepentingan warga, pasar dan negara. Maka, media tak hanya sebuah alat, namun telah menjadi ruang publik itu sendiri.

B. 3. Audit Sistem Komunikasi

Pembangunan kota, kini, tidak mungkin mengabaikan moda komunikasi. Kiranya, ini merupakan keniscayaan sejarah dimana sistem partisipatif sebagai bagian dari proses demokrasi dianggap sebagai model terbaik dalam pengambilan keputusan politik. Pengembangan sistem komunikasi pun menjadi agenda. Hal ini tak hanya menyediakan ruang untuk arus informasi dialogis, namun juga menjamin adanya bentuk transparansi dan akuntabilitas dari setiap keputusan publik di perkotaan. Transparansi dan akuntabilitas penting sebagai metode untuk membangun masyarakat rasional dan bentuk antisipasi akan risiko-risiko yang muncul dari sebuah sistem sosial.

Kasus pembangunan kota di Indonesia, dimana sedang tumbuh dari desa menjadi urban, perlu proses transformasi yang berjalan secara demokratis. Peran media pun menjadi penting. Maka, mengambil kasus di Yogyakarta pun memiliki relevansinya. Pertama, Yogyakarta telah tumbuh menjadi kota yang warganya adalah representasi dari multikultural Indonesia, kedua Yogyakarta tumbuh seiring tumbuhnya institusi pendidikan dan ketiga berbarengan dengan itu semua, Yogyakarta memiliki agenda pengembangan infrastruktur komunikasi.

Audit komunikasi pada sistem komunikasi warga kota mengadopsi dari ICA Communication Audit yang digagas oleh Goldhaber dan Rogers (1979). Audit Komunikasi kota dibentuk untuk menemukan pola-pola komunikasi warga kota. Pada konteks penelitian ini, audit komunikasi mencoba untuk menemukan pola komunikasi, infrastruktur komunikasi, dan ruang-ruang komunikasi (Jeffres 2008:259). Pola komunikasi

di komunitas, yang terstruktur jaringan dan sistem, mesti pula diaudit untuk mendapatkan pola-pola yang memberi perlindungan bagi hak hak asasi warga kota.

C. Metode

Persoalan-persoalan pada aras konseptual di atas akan mendorong kerja-kerja penelitian tentang praksis moda komunikasi di Kota Yogyakarta. Peneliti, secara konkret, akan mengaplikasikan metode penelitian yang *cross-sectional sample survey* di mana pengambilan data dilakukan terhadap sampel dengan hanya satu kali pengambilan data. Penelitian ini, dengan demikian, merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif, di mana temuan penelitian nantinya akan dikuantifikasi ke dalam angka-angka untuk dapat mendeskripsikan fenomena yang diteliti. Untuk keperluan tersebut maka sampel akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu: sampel yang mewakili warga kota yang hidup di perkampungan di Kelurahan Patehan dan sampel kedua mewakili warga kota yang hidup di perumahan, yaitu perumahan Suryo Asri I, Perumahan Jogja Regency dan Perumahan Timoho Asri III. Pemilihan dua kelompok sampel tersebut digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan ruang-ruang komunikasi yang digunakan dalam sistem komunikasi mereka sehari-hari.

D. GEO-SOSIOKULTURAL YOGYAKARTA

D.1. Geo-Sosial dan Kultural

Secara geografis, wilayah kota Yogyakarta terbentang antara 110°24'19" sampai 110°28'53" Bujur Timur dan 07°15'24" sampai 07°49'26" Lintang Selatan. Di tengah wilayah kota mengalir tiga sungai dari utara ke selatan, yaitu

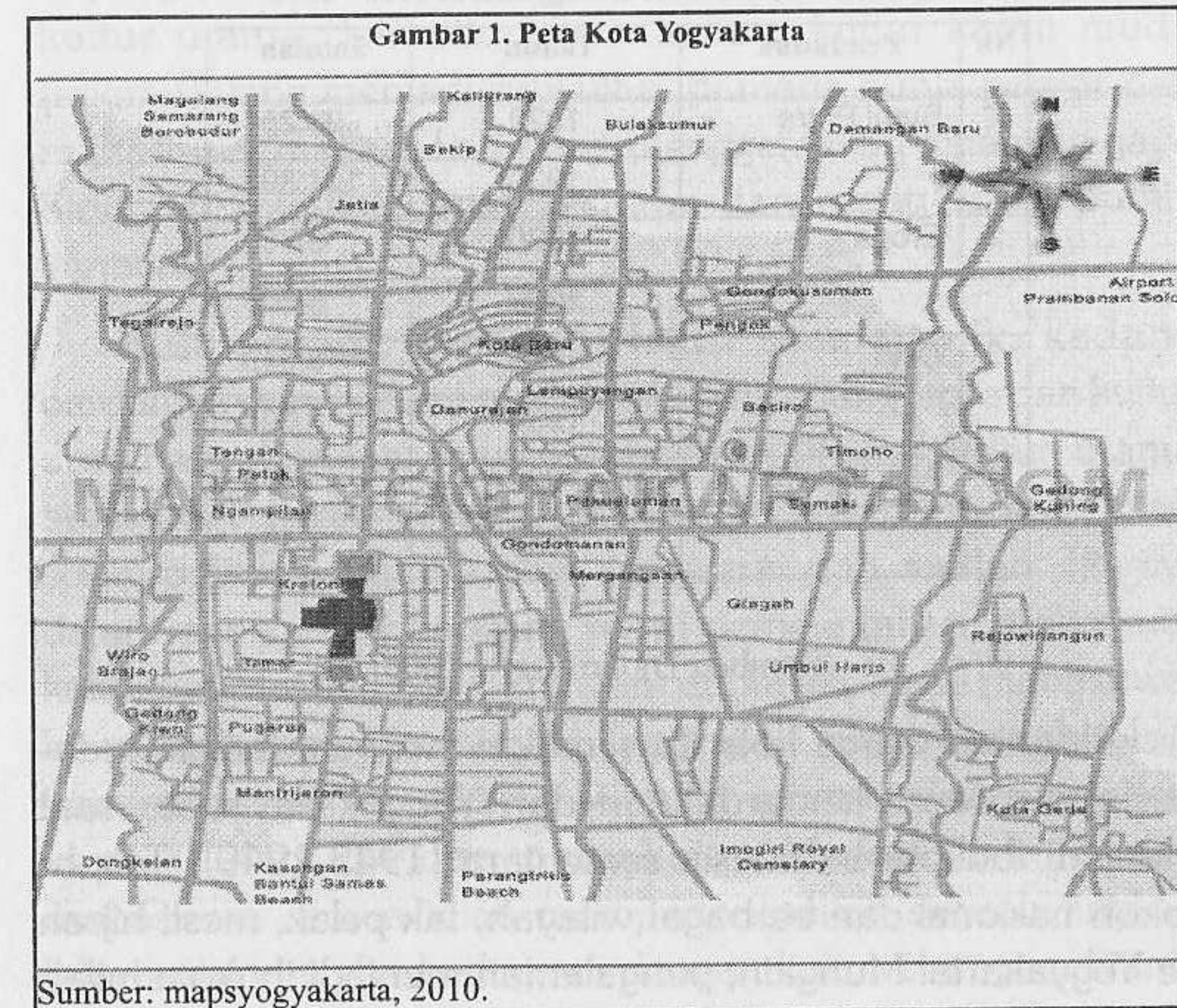
Sungai Winongo yang terletak di barat kota, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Gajah Wong di sisi timur kota. Secara keseluruhan, Kota Yogyakarta terletak di dataran rendah lereng Gunung Merapi, dengan kemiringan yang relatif datar dan pada ketinggian 114 meter di atas permukaan laut. Luas kota adalah 32,50 km².

Yogyakarta yang secara geografis terletak di tengah-tengah pulau Jawa memiliki posisi strategis secara ekonomi, sosial dan politik berbasis pada sejarah sosial sebuah kota. Letak pentingnya Yogyakarta dalam peta sosial-ekonomi-politik, kiranya, tak hanya melulu letak geografis yang strategis, namun justru terletak pada terbangunnya masyarakat jejaring yang memiliki ikatan dengan Yogyakarta. Taruhlah contoh, alumni dari perguruan tinggi di Indonesia senantiasa memiliki ikatan emosional dengan Yogyakarta. Jikalau seperti itu, apa yang istimewa dari Yogyakarta?

Yogyakarta sebagai kota utama dalam jejaring kiranya bisa dijejak sejak era kerajaan, kolonial, serta sampai kini. Era kerajaan sering disebut sebagai kota lama tradisional. Karakter khas dari kota lama ini, seperti diurai oleh Moertono (1985) atau Geertz (1980) adalah konsep mandala dalam tata ruangnya.⁴ Kota ini dibangun oleh Hamengkubowono I pada 1756, setelah perjanjian Giyanti yang membagi wilayah kerajaan Mataram menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Konsep kekuasaan ini menempatkan kraton dan raja sebagai pusat segala tata ruang. Jejak-jejak kota tradisional ini bisa ditemukan sekarang pada nama-nama kampung kota yang mengacu pada asal-usul, kepangkatan

⁴ Konsep mandala adalah konsep kekuasaan konsentris yang memusat pada raja dan kraton, yang banyak dianut di berbagai wilayah Asia sebagai hasil dari pengaruh model kekuasaan Hindhu-Buddha.

dan klasifikasi pekerjaan dalam birokrasi kraton. Sebagai contoh, kampung-kampung di sekitar Kraton bernama Patehan, Mantrijeron, Bugisan, Kumendaman, Kauman dan sejenisnya. Lihat peta di bawah yang mendeskripsikan tata kota konsentris mandala beserta penataan kota.



Yogyakarta sebagai kota modern memiliki akar historis sejak era kolonialisme. Sejak akhir abad ke-19 Kota Yogyakarta mengalami perubahan luar biasa, dimana ditandai oleh semakin pluralnya warga kota akibat kebijakan-kebijakan pemerintah Kolonial Belanda. Orang-orang asing yang mulai tinggal di Yogyakarta kala itu adalah orang-orang Eropa dan

Cina. Mereka adalah para pejabat pemerintah Belanda, pengusaha perkebunan, dan pengusaha lainnya. Seperti terjadi di kota lain, segregasi warga kota di era kolonial adalah mengikuti pembagian tiga golongan: golongan orang Eropa, timur asing dan golongan bumi putra (Suryo, 2005: 36-37).

Tabel 1. Penduduk Kota Yogyakarta 1920 - 1930

No	Penduduk	Tahun	Jumlah
1	Bumi Putra	1920	94.254
		1930	121.893
2	Eropa	1920	3.730
		1930	5.603
3	Cina	1920	5.643
		1930	8.894
4	Asia lainnya	1920	84
		1930	164

(Sumber: Djoko Suryo, 2005: 37)

Pluralitas warga kota itu semakin menguat tatkala Indonesia mencapai kemerdekaan dan Yogyakarta suatu saat menjadi ibukota Indonesia sementara (1945-1949). Tokoh-tokoh nasional dari berbagai wilayah, tak pelak, mesti hijrah ke Yogyakarta. Mungkin, pengalaman menjadi ibukota inilah yang mendorong Sultan Hamengkubuwono IX meluncurkan gagasan "Indonesia Mini" untuk Yogyakarta. Konkretnya, pendirian lembaga-lembaga pendidikan yang bisa menarik migrasi masuk para orang muda dari berbagai penjuru Indonesia. Jadilah Yogyakarta menjadi sentral dalam destinasi pendidikan.

D.2. Kultur Dominan dan Subkultur

Hal yang sering dilupakan tentang Yogyakarta adalah bahwa dampak konsep dan realitas "Indonesia Mini" menjadikan kondisi sosial-kultural masyarakat terbelah menjadi dua kultur: kultur Jawa yang di bawah bayang-bayang kraton dimana kental pula kultur abangan sebagai kultur utama (*leitkultur*) dan kedua, kultur kaum muda (*migran*) yang menjadi subkultur, di mana dunia pelajar dan mahasiswa (*migran*) hadir dan menggerakkan dinamika gaya hidup di kafe-kafe, mal, restoran dan ruang-ruang publik lainnya.

Kultur kaum muda ini hadir secara unik, kadang berdampingan, kadang mengkritik dan kadang lepas dari kultur dominan abangan Jawa (*leitkultur*). Jikalau kultur utama abangan lebih mengemuka dalam reproduksi ritual-ritual, relasi sosial-politik dengan kraton yang erat dan mudah ditemui dalam panggung-panggung resmi pemerintahan, maka subkultur kaum muda beredar dalam dunia aktivisme mahasiswa, konsumsi dan gaya hidup. Tengoklah konsumsi teknologi komunikasi di Yogyakarta. Warung internet, belanja pulsa, kepemilikan HP dan pemakaian laptop di kalangan mahasiswa, semua telah mempertontonkan sebuah tingkah laku sosial yang berbeda jauh dengan kultur abangan. Dunia konsumsi dan gaya hidup pun segendang sepermainan, hadir di ruang-ruang publik baru seperti mall, kafe dan restoran-restoran, para kaum muda menampilkan reproduksi budaya global yang berbeda jauh dengan ruang publik para kaum abangan. Kultur minor ini seolah mengabaikan bahwa di sampingnya berdiri kultur abangan. Orang bisa menonton karnaval prajurit kraton sambil minum kopi di Starbuck atau Mc Donald.

Meski berbeda, kultur dominan dan subkultur saling berdialog dalam berbagai kasus, sehingga mendorong Yogyakarta menjadi kota multikultur. Apakah dua kultur ini mempengaruhi pola-pola komunikasi kota, sehingga turut membangun *communicative city*? Di sinilah perlunya identifikasi responden, agen-agen yang membangun kota. Siapa saja mereka, apa latar belakang dan tindakannya.

Lokasi penelitian sebagai konteks dan dinamika agensi (warga kota) pun, berdialektik membangun karakter kota. Proses dialektik inilah yang terjadi dalam sebuah sistem komunikasi kota. Semakin proses komunikasi tersebut minim hambatan, maka sistem kota itu pun semakin maju. Di sinilah kota lalu disebut sebagai kota komunikatif.

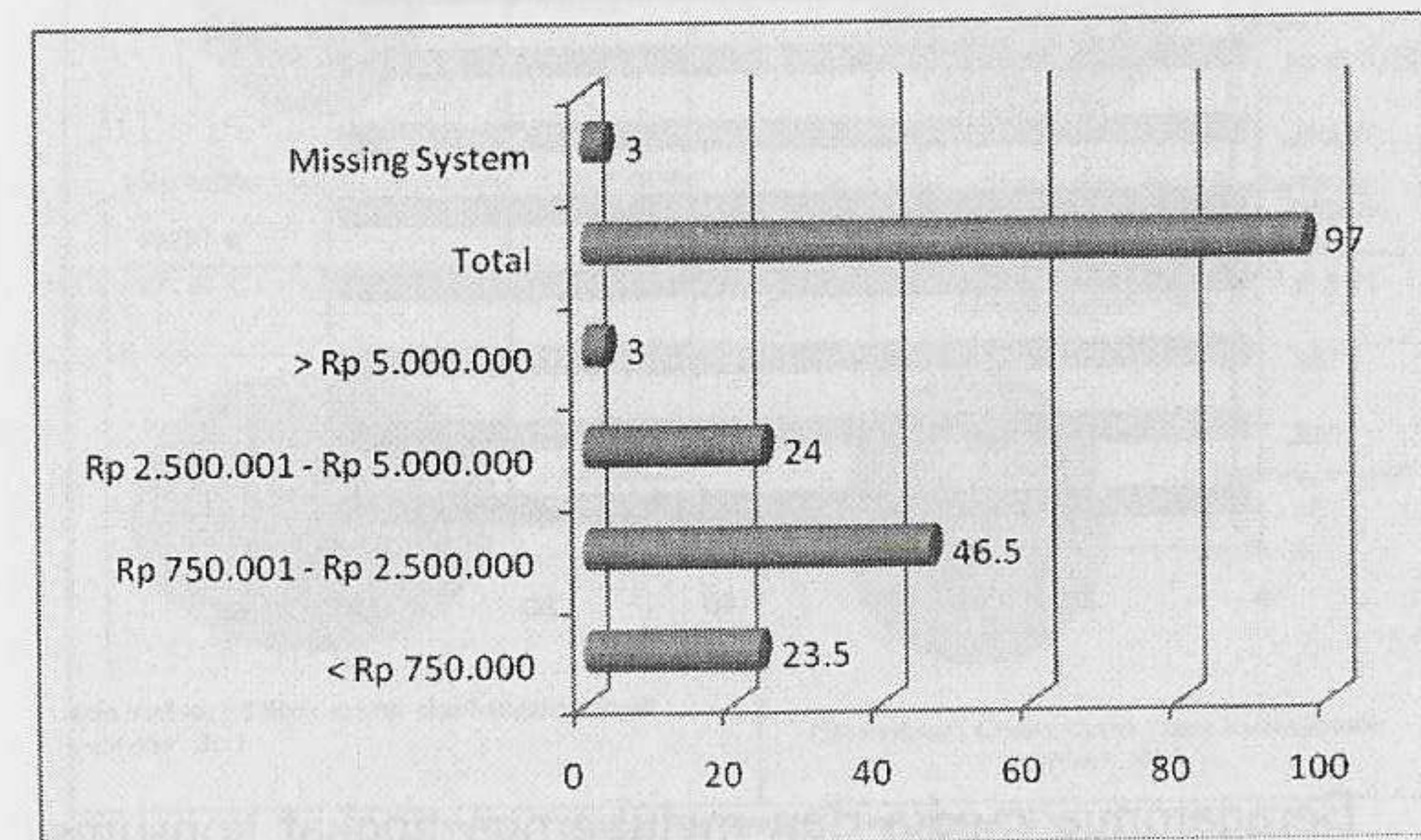
E. Kultur Kota: Konsumsi dan Identitas

Siapa yang mendominasi warga kota Yogyakarta? Dari penelitian ini terungkap bahwa usia warga kota didominasi oleh rentang usia 25-40 tahun. Hal ini, kiranya, jika dikomparasikan dengan hasil sensus penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta 2009 oleh Biro Pusat Statistik Yogyakarta, menunjukkan adanya kesejajaran. Arti yang lain, jumlah itu menunjukkan bahwa usia kerja penduduk di Yogyakarta cukup dominan.

Meski demikian, usia produktif tersebut tidak serta merta berbanding lurus dengan penghasilan yang tinggi. Tingkat konsumsi responden bisa menunjukkan bahwa rerata warga Yogya tidaklah tinggi. Berdasar tingkat pengeluaran per bulan, responden yang terbanyak berasal dari kelompok dengan pengeluaran antara Rp 750.000- Rp 2.500.000 sebanyak 46.5%. Pengeluaran terendah tercatat adalah responden

dengan pengeluaran sebesar Rp 150.000/ bulan dan yang tertinggi adalah Rp 10.000.000/bulan. Dari seluruh responden yang terlibat dapat dibuat rata-rata pengeluaran mereka per bulan adalah Rp 2.037.628,9

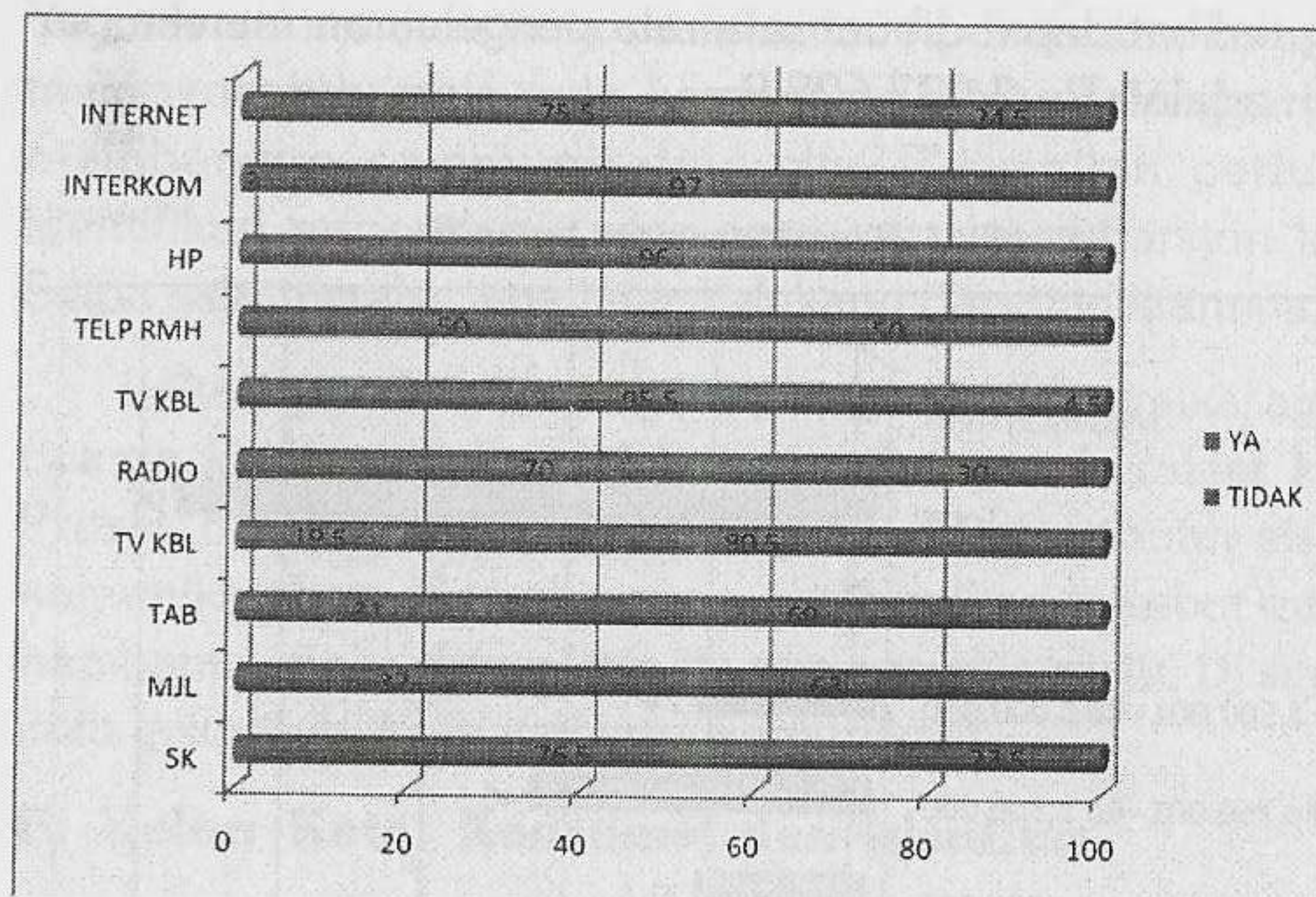
Grafik 1. Pengeluaran per bulan (%)



F. Kepemilikan Media Komunikasi

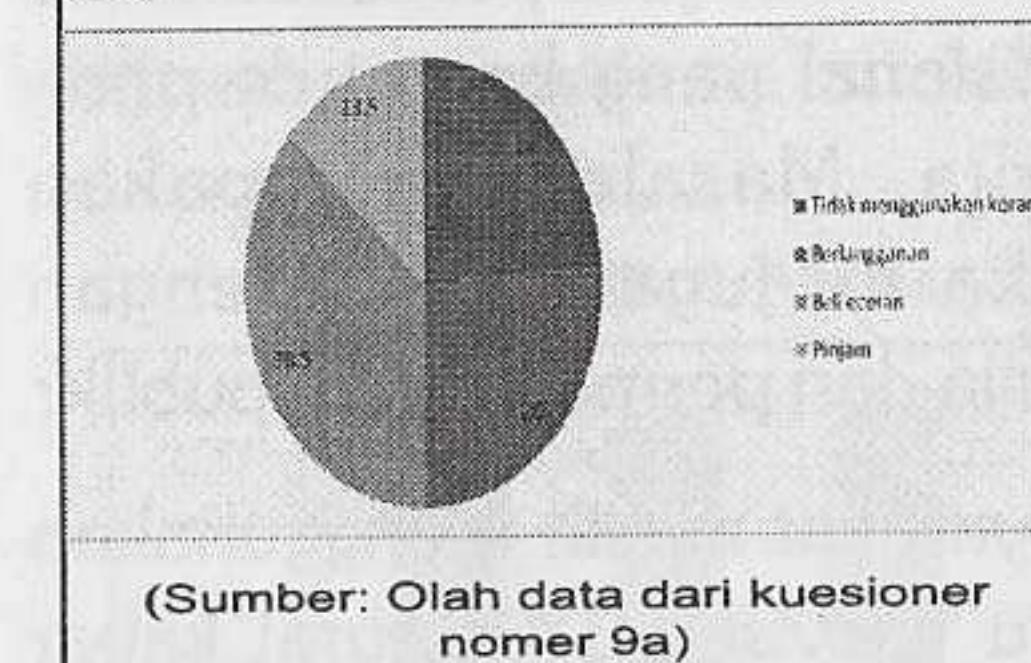
Lebih jauh, tampaknya, predikat kota pelajar, kultur kota dan identitas mereka mendorong warga untuk mengkonsumsi teknologi komunikasi sebagai hal penting. Internet, televisi, telepon rumah dan telepon seluler menjadi sarana komunikasi penting. Moda komunikasi tampak bercampur antara hiburan, konsumsi dan kebutuhan komunikasi sosial.

Grafik 2. Kepemilikan Media Komunikasi

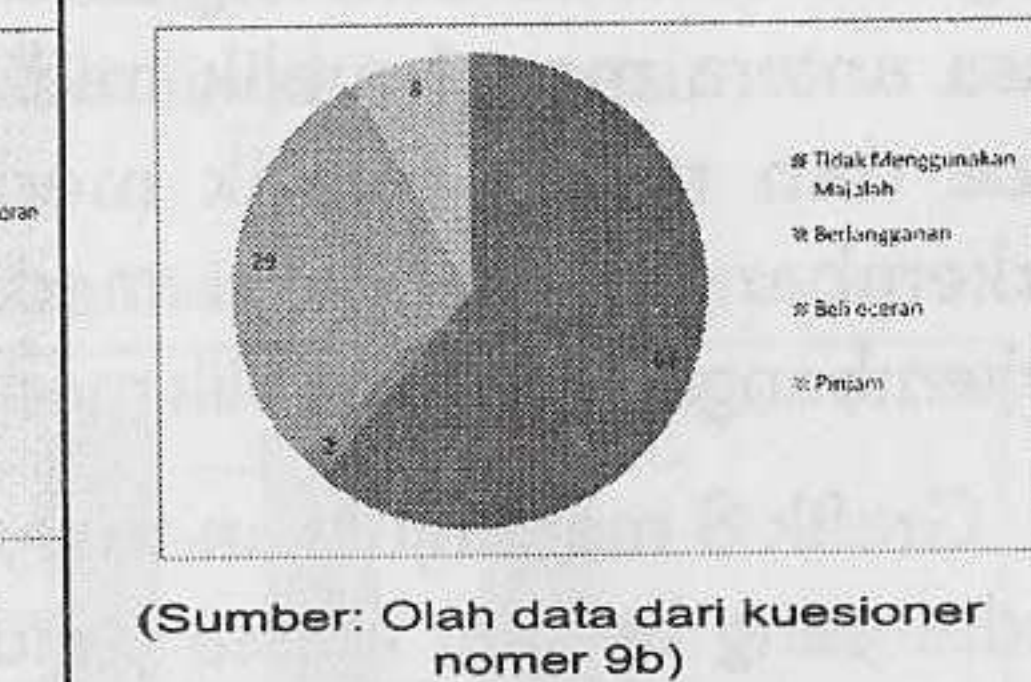


Beragamnya media dan melubernya tingkat konsumsi mendorong dan mengubah pula cara-cara mengakses teknologi media. Sewa internet, beli eceran koran atau majalah, bahkan cukup pinjam adalah bukti. Seseorang tidak lagi cukup hanya membutuhkan satu media dalam mengakses informasi. Akibatnya, tindakan konsumsi media pun mengalami jenjang prioritas. Kebutuhan akan hiburan seperti yang disediakan oleh televisi dan kebutuhan untuk telepon seluler adalah jenis media yang mesti dimiliki. Bukan hanya itu penting untuk hiburan, namun itu juga menunjukkan bahwa teknologi komunikasi mendorong ruang privat dan publik semakin lengket dan susah untuk dipisah.

Grafik 3. Cara Mendapatkan Koran (%)



Grafik 4. Cara mendapatkan majalah (%)



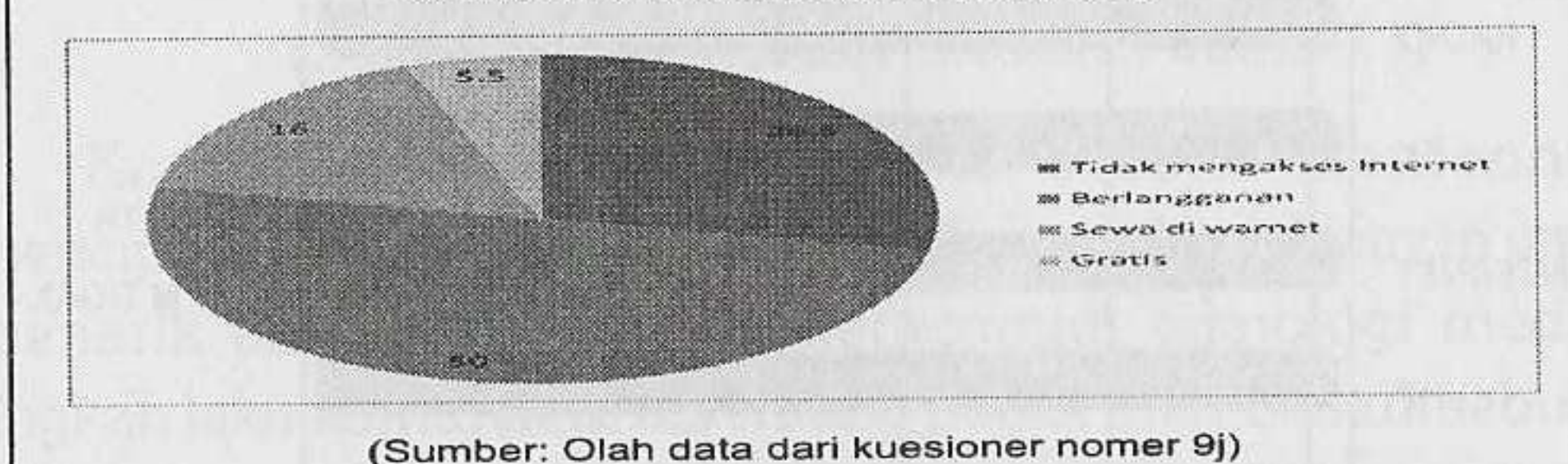
Grafik 5. Cara Mendapatkan Tabloid (%)



Grafik 6. Cara Mengakses Handphone (%)



Grafik 7. Cara Mengakses Internet (%)



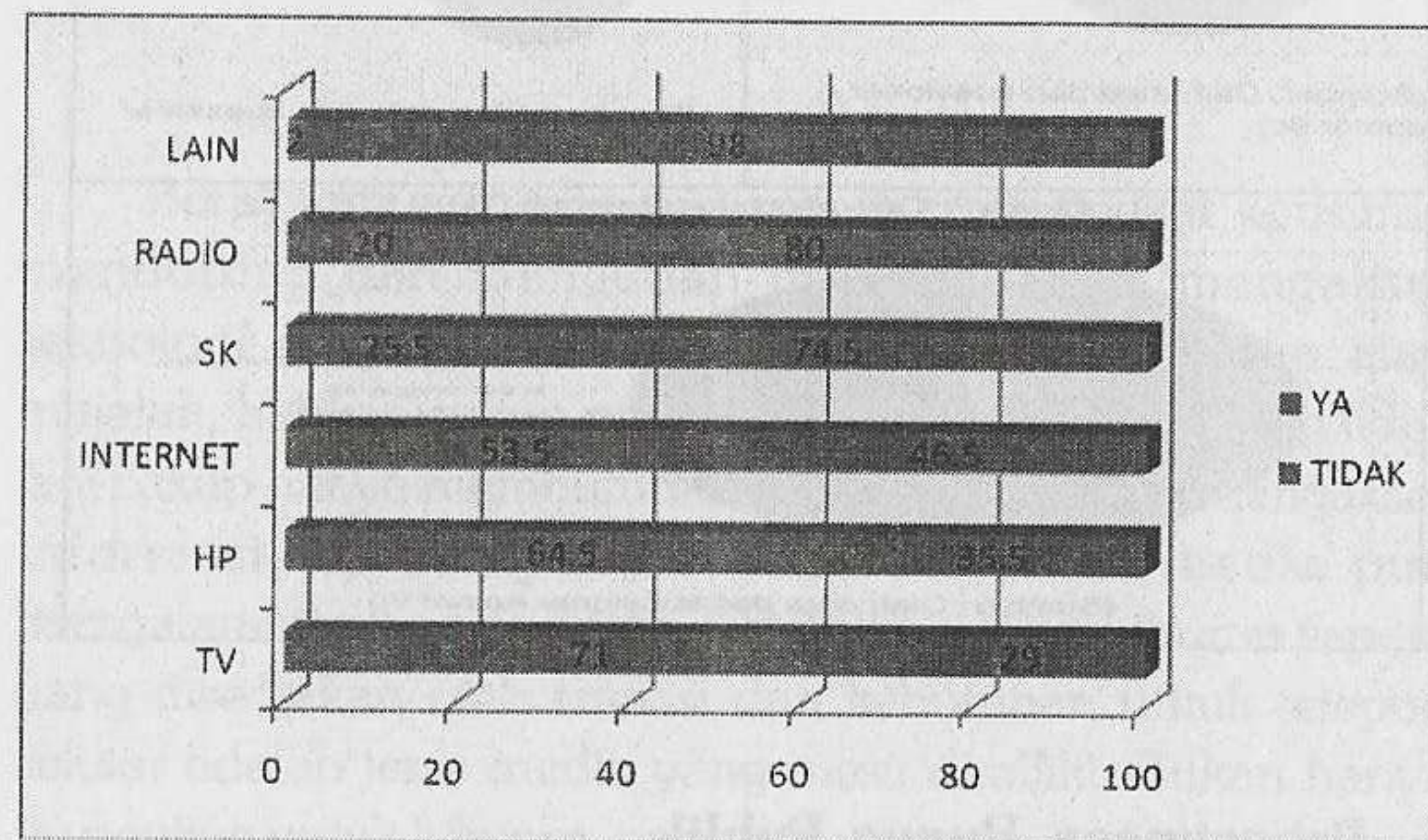
G. Penggunaan Ruang Publik

Ruang publik media adalah konsep baru hasil evolusi ruang publik yang dikembangkan oleh Juergen Habermas. Thompson (1995:127) mengembangkan ruang publik media sebagai *publics without places*. Dalam artian ini, kehadiran media mendorong tumbuhnya *the mediated publicness*.

Jika melihat penggunaan media setiap hari, terlihat bahwa komunikasi warga mengalami mediasi yang luar biasa. Asumsi yang kemudian dikembangkan adalah terjadi perbedaan luar biasa antara ruang publik tradisional yang berciri *co-presence* dan ruang publik media. Masalahnya, apakah perkembangan teknologi media ini juga segaris dengan perkembangan ruang publik media dan permasalahan publik?

Grafik 8 menunjukkan masyarakat masih menggunakan media yang bersifat massa yaitu televisi (71%), surat kabar (25.5%), dan radio (20%). Sedangkan media non massa yang juga mulai banyak dilibatkan dalam aktivitas harian responden adalah internet (53.5%) dan *handphone* (64.5%).

Grafik 8. Media yang Digunakan Setiap hari

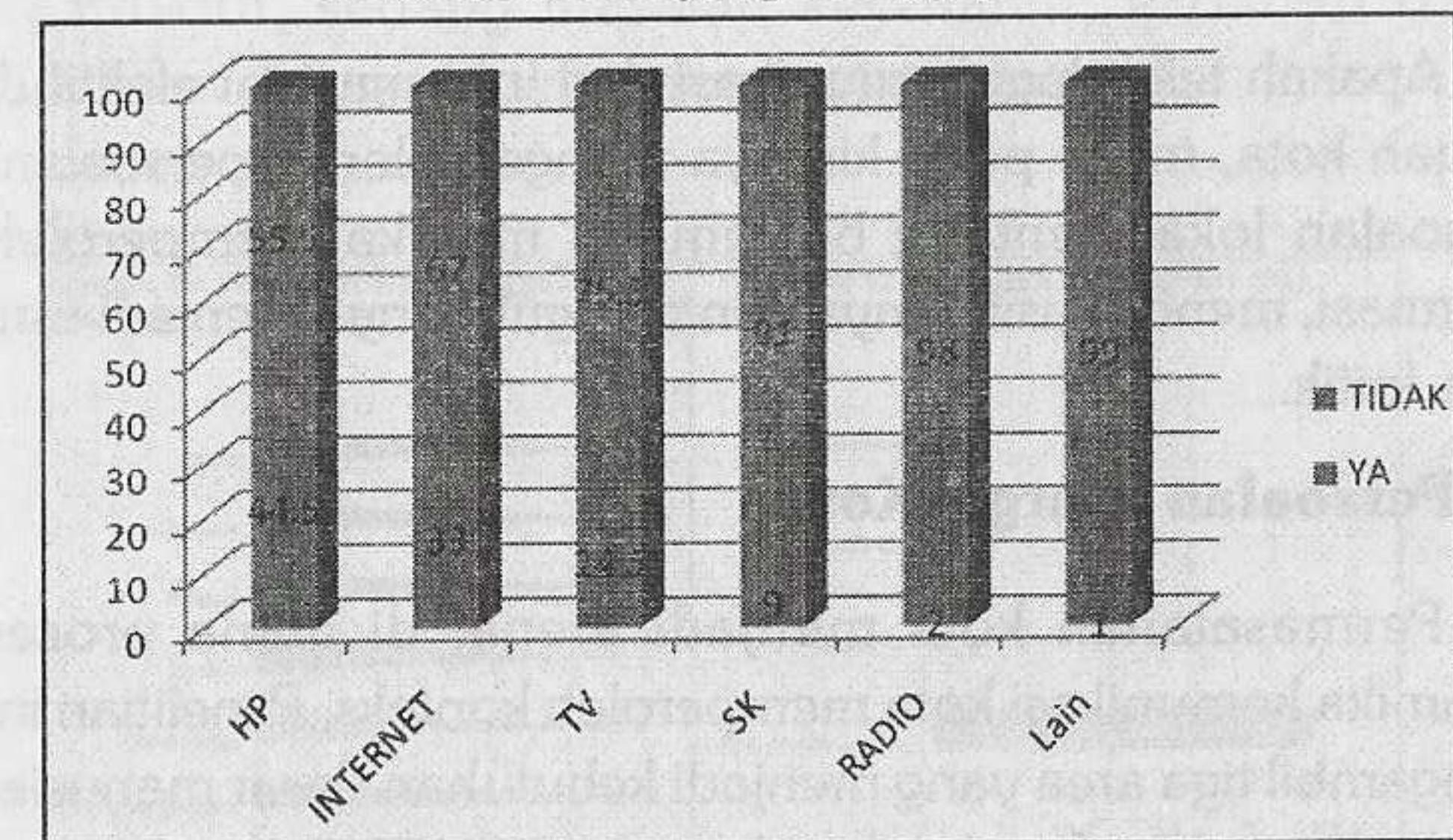


(Sumber: Olah data dari kuesioner nomer 10)

Meski media televisi dianggap terpenting oleh sebagian besar responden, dilihat dari sisi fungsi tergambar jelas bahwa telepon seluler (44.5%) dan internet (33%) lebih utama

ketimbang televisi (24.5%), seperti ditunjukkan oleh grafik 9. Hal ini kiranya berkait dengan persepsi masyarakat bahwa televisi adalah media hiburan dan internet atau telepon seluler lebih sebagai medium untuk lalu lintas informasi.

Grafik 9. Media yang Dianggap Penting



(Sumber: Olah data dari kuesioner nomer 11)

Keragaman teknologi media beserta kontennya menciptakan klasifikasi dalam moda komunikasi. Namun yang menarik adalah bagaimana keragaman teknologi media, tingkah laku komunikasi dan ruang publik membentuk sebuah sistem komunikasi kota.

Dalam terminologi Kunzmann's (1997:28 dalam Carpentier 2008¹) fenomena itu mendeskripsikan dinamika moda komunikasi sebagai konsep "*the communicative city*". Konsep yang menggagaskan bahwa informasi baru dan teknologi komunikasi dapat dan mestinya bisa digunakan lebih untuk mengintegrasikan kebutuhan informasi lokal dan regional, serta untuk mendorong warga kota, dengan informasi

kewargaan, untuk bisa hidup nyaman dalam sebuah komunitas aktif. Jadi, teknologi dan informasi adalah elemen penting untuk inisiatif terciptanya diskusi kritis, untuk mencipta identitas lokal dan kebanggaan warga, dan pada akhirnya untuk memperkuat partisipasi dan komitmen pembangunan kota.

Apakah teknologi komunikasi dan informasi ini efektif di sebuah kota, maka perlu kiranya mengeksplorasi persoalan-persoalan lokal, tentang bagaimana mereka memperoleh informasi, mendiskusikannya dan mengubahnya menjadi usul atau kritik.

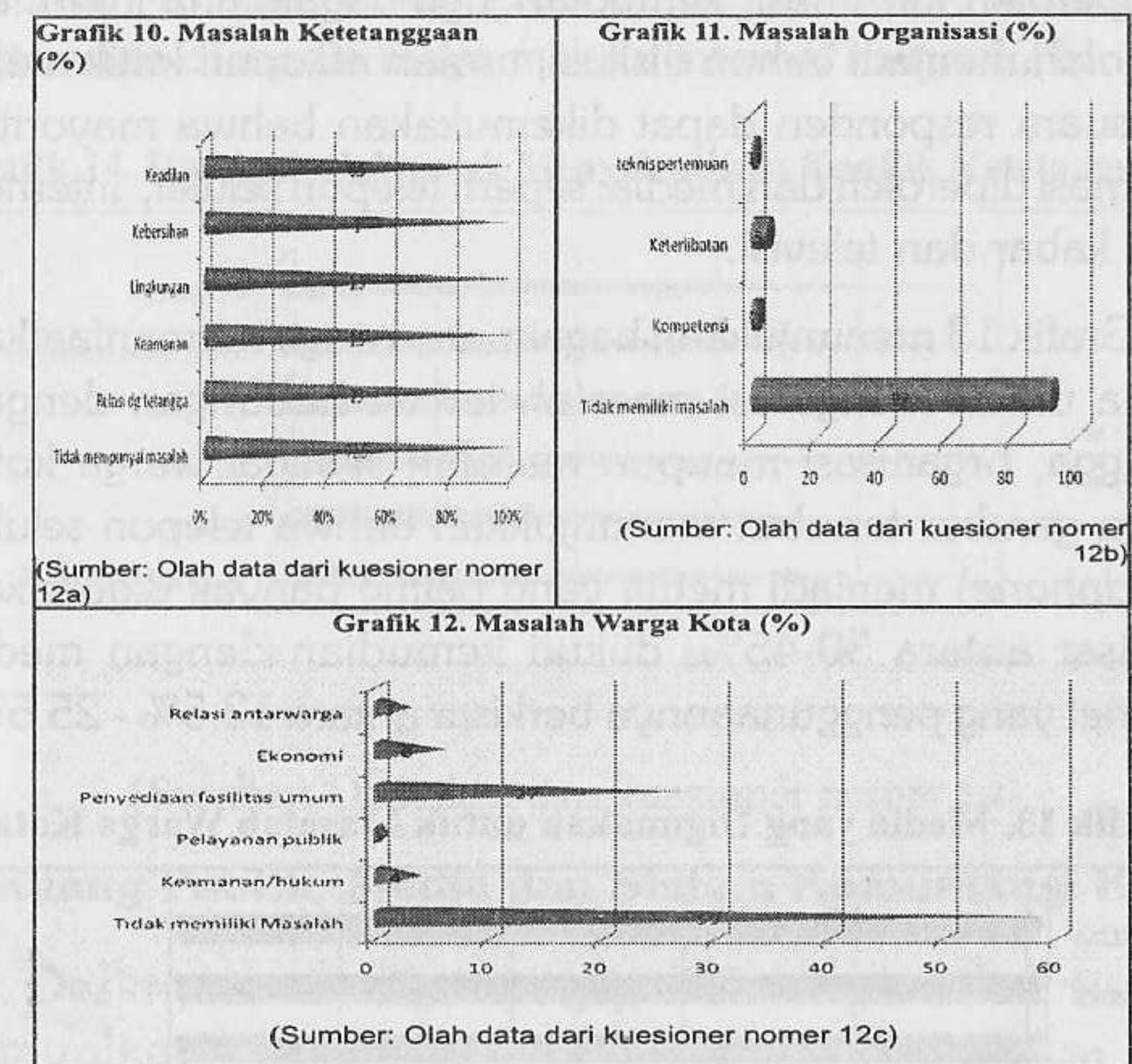
H. Persoalan Warga Kota

Permasalahan kota menjadi arena, di mana proses dinamika komunikasi kota memperoleh konteks. Penelitian ini mengambil tiga area yang menjadi kebutuhan dasar manusia: pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Asumsi yang mendasari adalah tiga persoalan itu menjadi dasar dari semua warga kota untuk mengembangkan komunikasi kota.

Tiga persoalan itu diletakkan dalam konteks ruang publik tradisional dan ruang publik media. Di sinilah akan ditemukan ruang-ruang publik warga kota, ruang di mana warga membangun sistem komunikasinya. dari grafik 10 terlihat bahwa masalah memiliki relevansi tatkala bermain dalam level komunitas. Masalah ketetangaan seperti kekompakan atau merosotnya solidaritas sosial menjadi utama. Di tingkat kota, masalah yang dikeluhkan warga adalah pada pelayanan fasilitas publik seperti infrastruktur, pendidikan dan juga keamanan.

Meski demikian, ada hal yang menarik bahwa mayoritas responden menjawab tidak memiliki masalah hidup di kota. Benarkah demikian?

Jika menilik jawaban-jawaban responden terlihat sebenarnya masalah-masalah konkret kota lebih pada infrastruktur, sedang masalah kesehatan, ekonomi dan pendidikan dianggap sebagai masalah nasional.



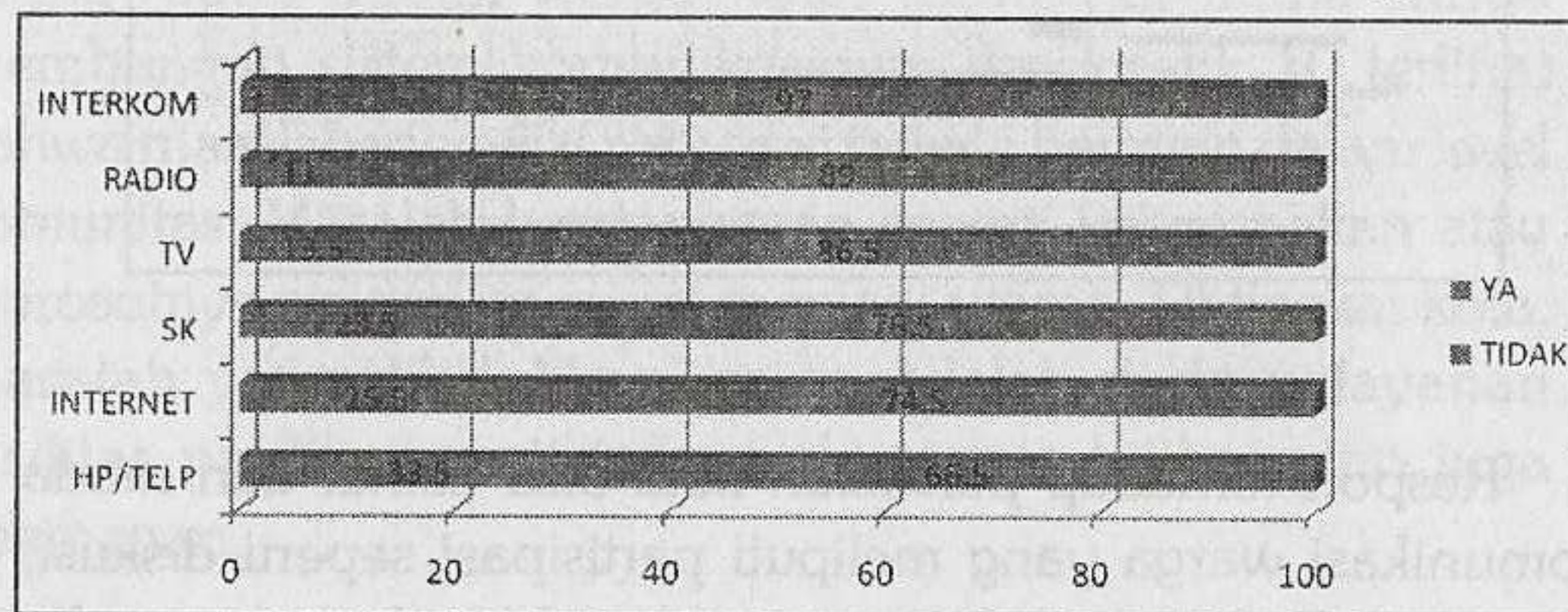
Respon terhadap persoalan kota bisa dilihat dari moda komunikasi warga yang meliputi partisipasi seperti diskusi, interaksi dan dialog dalam ruang publik dengan aneka teknologi komunikasi. Selain itu, deskripsi Kunzmann tentang

kota komunikatif mengajak kita untuk menengok konsep komunikasi politik. *Dus*, membangun kota komunikatif adalah bermakna pula sebagai membangun demokrasi. Lebih jauh, seperti diungkapkan oleh Carpentier, konteks demokrasi ini tentu saja imperatif. Warga kota terlibat diskusi dengan warga lain, memiliki hak dalam hal informasi dan akses untuk berpartisipasi.

Jika proses komunikasi meliputi hak dan cara untuk memperoleh informasi, kemudian juga bagaimana informasi itu diolah menjadi bahan diskusi, usulan ataupun kritik maka dari suara responden dapat dikemukakan bahwa mayoritas informasi diperoleh dari media: seperti telepon seluler, internet, surat kabar dan televisi.

Grafik 13 menunjukkan bagaimana warga memanfaatkan media untuk mengatasi masalah terkait hubungan dengan tetangga, organisasi maupun masalah sebagai warga kota. Ketiga gambar tersebut menunjukkan bahwa telepon seluler (*handphone*) menjadi media yang paling banyak digunakan berkisar antara 30-45%, diikuti kemudian dengan media internet yang penggunaannya berkisar antara 12.5% - 25.5%.

Grafik 13. Media yang Digunakan untuk Masalah Warga Kota

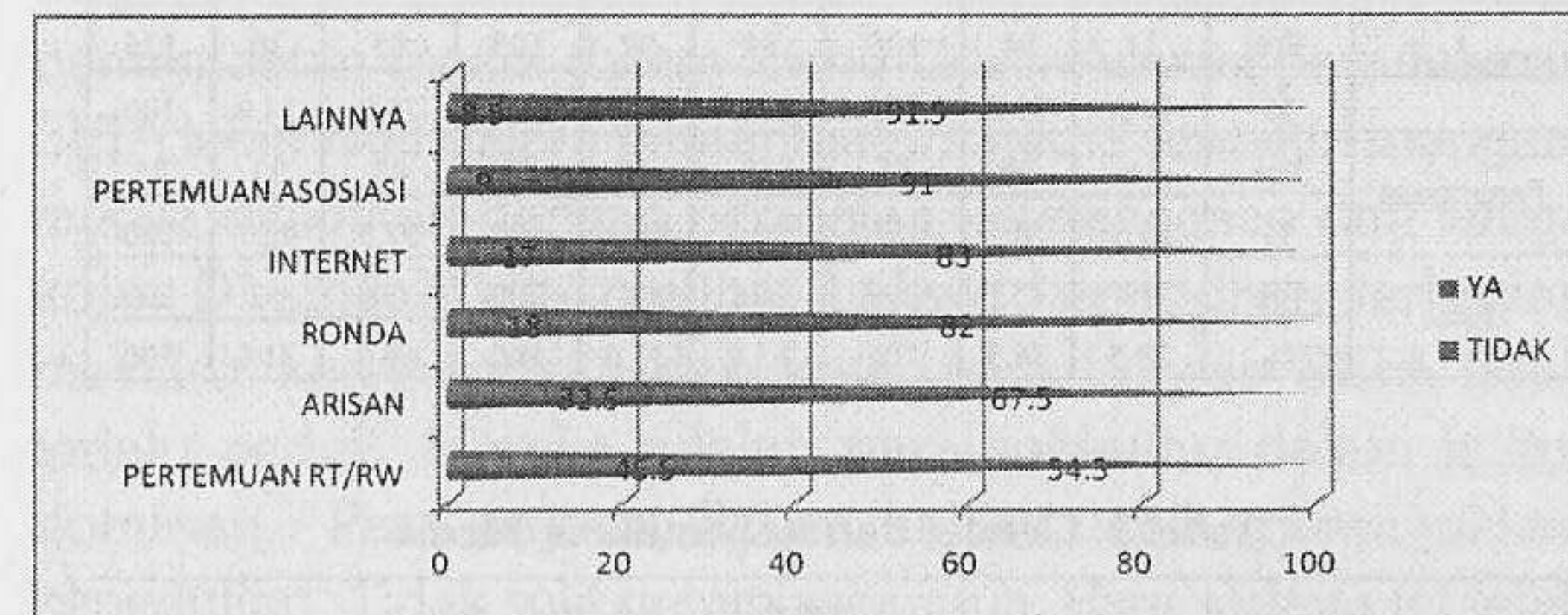


(Sumber: Olah data dari kuesioner nomer 13)

Hal yang menarik ditemukan meskipun *handphone* dan internet banyak mendominasi sebagai media yang digunakan warga untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka, namun nampaknya warga masih lebih percaya pada media yang melibatkan mereka secara langsung (*face to face*).

Grafik 14 memperlihatkan bagaimana warga menyelesaikan konflik-konflik ketetanggaan yang terjadi dengan menggunakan pertemuan warga seperti pertemuan RT/ RW (45.5%), arisan (32.5%), ronda (18%), sedangkan pertemuan di media maya melalui internet hanya 17%.

Grafik 14. Ruang Sosial untuk Menyelesaikan Konflik Ketetanggaan



(Sumber: Olah data dari kuesioner nomer 14)

I .Ruang Publik, Media dan Sistem Komunikasi Kota

Deskripsi tentang ruang publik, media dan sistem komunikasi kota terlihat semakin kompleks jika mempertimbangkan tabulasi silang dari beberapa temuan pertanyaan. Deskripsi ini mencoba mencari relasi antara kepemilikan media, aktivitas sosial media, ruang publik dan sejauh mana moda komunikasi tersebut efektif untuk membangun kota komunikatif.

Yang menarik, tatkala konsumsi informasi itu beralih menjadi produksi informasi atau tingkah laku kritik dan diskusi, maka ruang publik tradisional lebih dominan. Pertemuan-pertemuan rukun tetangga dan rukun warga yang mengandalkan pertemuan langsung tetaplah prioritas dalam menyelesaikan aneka persoalan. Sebaliknya, kritik dan diskusi di media hampir tidak digunakan.

Dalam pembagian dua ruang publik, tradisional dan media, fenomena ini menunjukkan bahwa ruang publik media belumlah benar-benar bisa mewadahi aspirasi atau partisipasi warga. Bahkan, bisa pula dibaca bahwa ruang publik media resmi justru masih dikuasai oleh pengambil keputusan atau elite-elite sosial, politik dan ekonomi. Warga kota pun susah berpartisipasi dalam ruang-ruang media.

Namun, telepon seluler dan internet menjadi konsumsi teknologi komunikasi dalam hidup keseharian. Artinya, teknologi komunikasi tersebut menjelma pula menjadi ruang publik, tempat dimana resistensi dan diskusi informal tentang aneka soal terjadi. kasus-kasus seperti Prita melawan rumah sakit dan keistimewaan Jogja menjadi isu-isu hangat di media. Ruang publik media informal ini menjadi alternatif bagi diskusi dan resistensi warga.

Tiadaanya perbedaan ruang publik bagi yang aktif dalam pemanfaatan media dan yang tidak menampilkan sebuah tafsir bahwa tingkah laku konsumsi media lebih bersifat hiburan dan personal ketimbang membangun sebuah pola komunikasi yang meluas di segala level masyarakat, seperti dari komunitas, lokal, maupun nasional.

Meski demikian, terlihat ada gerak perubahan dalam tingkah laku komunikasi. Warga cenderung mengambil

internet sebagai media baru untuk melakukan kritik. Bisa dipahami, hal ini terjadi karena komunikasi yang termediasi akan mendorong orang untuk bebas dalam melakukan keluhan atau kritik. Orang tidak perlu mengalami hambatan-hambatan kultural dalam berkomunikasi. Celaknya, berhadapan dengan pemerintah kota pengambil keputusan, ruang publik media tidak mendapatkan respon. Amatan terhadap *website* pemerintah kota menunjukkan bahwa aktualitas selalu menjadi problem. Kecepatan dalam menyampaikan informasi sangat lambat.

Di sinilah kita menemukan celah terputusnya komunikasi. Warga cenderung menggunakan ruang publik tradisional karena merasa memiliki respon langsung, terjadi dialog langsung. Meski demikian, ruang publik tradisional ini seringkali lepas dari soal-soal yang dihadapi, sebab jantung persoalannya terletak di tingkat pengambil keputusan kota atau skala nasional.

Celah komunikasi dalam ruang publik ini bisa dijumpai jika muncul ruang ketiga, yang disebut organisasi media alternatif. Media alternatif berbasis konsep "*alternativeness*", dengan demikian menekankan keterkaitan antara media *mainstream* dan komunitas. *Dus*, media alternatif lebih menekankan pada cara-cara pengorganisasian, alternatif dikursus dan representasi serta membuat alternatif format dan genre. Partisipasi, lalu, memerankan peran krusial dalam membangun *third voice or third type* dari sistem komunikasi.

Pada titik ini, konsep alternatif juga bermakna demokratisasi media, dimana mengizinkan warga untuk aktif dalam berbagai lingkup skala. Media alternatif juga mendorong demokratisasi via media, sehingga warga bisa berpartisipasi

dalam debat publik dan merepresentasikan kepentingannya dalam ruang publik.

Media alternatif lalu mesti pula memerankan jalan tengah dalam berjejaring antara kepentingan negara dan pasar. *Dus* media alternatif menempatkan warga kota sebagai bagian dari gerakan civil society. Keberhasilan media alternatif kiranya akan membantu proses demokrasi kota berjalan.

Dalam konteks penelitian ini, lalu, celah dalam ruang komunikasi dalam moda komunikasi warga kota bisa dipecahkan kalau sistem komunikasi tradisional dan baru berintegrasi, mengatur jejaring antara kepentingan pasar dan negara.

Di sinilah pengorganisasian komunitas, baik dalam partisipasi dan produksi konten media menjadi penting. Di situlah diskursus, debat dan aspirasi warga menjadi penting. Ruang-ruang inilah yang kini mesti didorong sebagai upaya membangun kota yang manusiawi, kota berbasis hak asasi manusia, dan itu adalah kota komunikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, Mary Ann, 2008, "Measuring Urban Communication: Frameworks and Methods for Developing the Criteria for the Urban Communication Foundation Communication City Award," dalam *International Communication Gazette* 2008:70.p275-289.
- Appadurai, Arjun, *Modernity at Large*. 1996. *University of Minnesota Press*.
- Appadurai, Arjun, 1998, „Globale Landschaften” dalam Ulrich Beck (ed.), *Perspektiven der Weltgesellschaft*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Beck, Ulrich, 1995, *die feindlose Demokratie*, Ditzingen: Reclam.
- _____, 1997, *Was ist Globalisierung?* Frankfurt am Main, Suhrkamp.
- Bourdieu, Pierre dan L.J.D. Wacquant, 1996, *Reflexive Anthropologie*, Frankfurt am Main : Suhrkamp.
- Carpentier, Nico, 2008, „The Belly of the City: Alternative Communicative City Networks” dalam *International Communication Gazette*. P.237-255.

- Castells, Manuel, Mireia Fernandez-Ardevol, Jack Linchuan Qiu, Araba Sey, (2004) *The Mobile Communication Society: A Cross cultural analysis of available evidence on the social uses of wireless communication technology*. Annenberg Research Network on International Communication, University of Southern California.
- Castells, Manuel, 1977, *Die Kapitalistische Stadt*, VSA Verlag.
- Cark, David, 1996, *Urban World/ Global City*, London-New York: Routledge.
- Evers, Hans-Dieter, 1995, *Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: LP3ES.
- Fisher, William F., dan Thomas Ponniah, 2003, *Another World is Possible: Popular Alternatives to Globalization at the World Social Forum.*, Nova Scotia/Selangor/Capetown/London&New York, Fernwood Publishing LTD, Sird, David Philip, Zed Books.
- Foucault, Michel, 1997, „Panopticism”, dalam Neil Leach, *Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory*, London/New York: Routledge.
- Fyfe, Nicholas, 1998, “Introduction: reading the street” dalam Nicholas Fyfe (ed.), *Images of the Street: Planning, Identity and Control in Public Space*, London-New York, Routledge. P1-13.

- Garnham, N, 2007, Habermas and Public Sphere, *The International Journal of Research into New Media Technologies* 13, no. 3 : 307-19.
- Geertz, Clifford J. 1980. *Negara: The Theater State in Nineteenth Century Bali*. Princeton University Press.
- Giddens, Anthony, 1979, *Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis*, London: the Macmillan Press LTD.
- _____, 1984, *The Constitution of Society*, London: Polity Press.
- Gumpert, Gary dan S.J. Drucker, 2008, “Communicative Cities,” dalam *International Communication Gazette* 2008.70.195-208.
- Gottdiener, Mark dan Ray Hutchison, 2000, *The New Urban Sociology*, Westview Press.
- Hutton, Will & Anthony Giddens, 1990, *Global Capitalism*, New York: The New Press.
- Jeffres, Leo W. 2008, “An Urban Communication Audit: measuring Aspects of a Communicative City” dalam *International Communicative Gazette* 2008,70:257-273.

Murtono, Sumarsaid, & Cornell University. Modern Indonesia Project. 1981 *State and statecraft in old Java : a study of the later Mataram period, 16th to 19th century*. Modern Indonesia Project, Southeast Program, Cornell University, Ithaca, N.Y.

Loew, Martina, 2001, *Raumsoziologie*, Suhrkamp.

Luhmann, Niklas, 1999, *Soziale Systeme: Grundriss einer Allgemeinen Theorie*, Suhrkamp.

Bambang Kusumo Prihandono, pengajar pada Program Studi Sosiologi Bisnis dan Media, FISIP, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Lulus Sarjana Sosial dari Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan gelar MA dari Westfälische Wilhelms Universität Munster Jerman.

Fokus kajian dalam pengajaran dan riset meliputi sosiologi media, Kultur Pop dan Teori Sosiologi. Publikasi karya tulisnya tersebar di jurnal dan surat kabar berbahasa Indonesia dan Jerman. Kini sedang melakukan penelitian tentang Suporter Bola, Kekerasan, dan Identitas.

Fransisca Anita Herawati, adalah dosen pada Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Atma Jaya Yogyakarta sejak tahun 1998. Ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (SIP) dari Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIPOL, UGM dan meneruskan studi Magister pada Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, UI (2004) dengan judul tesis "Pola Hubungan Faktor-Faktor yang Membentuk Loyalitas Merek (Studi Pada Iklan Rokok Sampoerna A Mild di Kalangan Perokok di Yogyakarta).

Ketertarikan pada bidang periklanan menjadikannya banyak melakukan riset pada bidang tersebut dan juga terlibat dalam aktivitas praktis industri periklanan di Yogyakarta. Secara khusus konsen tersebut dilakukan dengan menjadi anggota Badan Pengawas Periklanan Daerah yang berada di bawah Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, Pengda DIY.

Saat ini, ia dipercaya untuk menjadi Koordinator Pengelola Jurnal Ilmu Komunikasi, FISIP UAJY. Selain itu, ia juga banyak terlibat dalam beragam aktivitas di universitas seperti di Pusat Studi Kewirausahaan (PUSWIRA) UAJY dan sebagai Auditor Internal program ISO 9001:2008 di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penelitian pada bidang penelitian manajemennya banyak melalui riset pada bidang tersebut dan juga terlibat dalam aktivitas praktis industri penelitian di Yogyakarta. Secara khusus karena tersebut dilakukan dengan menjadi anggota Badan Pengawas Pendidikan Dasar yang berada di bawah Persatuan Perusahaan Pendidikan Indonesia, Penda DIY.

Penelitian Anita Herawati adalah dosen pada Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta sejak tahun 1998. Ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (SIP) dan Sarjana Ilmu Komunikasi (FISIPOL) UGM dan meneruskan studi Magister pada Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI (2004) dengan judul tesis "Pola Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Manajerial Pada Riset Rokok Sampolan A Mild di Kelangkaan (Studi Kasus Rokok Sampolan A Mild di Kelangkaan Parok di Yogyakarta).

Bola Kerasan, dan Identitas. Jurnal Kajian dalam pengajaran dan penelitian sosiologi, media, hukum, politik dan teori sosiologi, publikasi ilmiah terdapat di jurnal dan buku-karya lainnya. Indonesia dan Jerman. Kini sedang melakukan penelitian tentang supporter Bola Kerasan, dan Identitas.

Munster Jerman. Penelitian sosiologi, 1992, tahun 1992.

Fokus kajian dalam pengajaran dan penelitian sosiologi.

media, hukum, politik dan teori sosiologi, publikasi ilmiah

terdapat di jurnal dan buku-karya lainnya. Indonesia dan

Jerman. Kini sedang melakukan penelitian tentang supporter

Bola Kerasan, dan Identitas.

Penelitian Anita Herawati adalah dosen pada

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya

Yogyakarta sejak tahun 1998. Ia memperoleh gelar Sarjana

Ilmu Politik (SIP) dan Sarjana Ilmu Komunikasi (FISIPOL)

UGM dan meneruskan studi Magister pada Departemen Ilmu

Komunikasi, FISIP UI (2004) dengan judul tesis "Pola

Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Manajerial Pada Riset Rokok Sampolan A Mild di Kelangkaan (Studi Kasus Rokok Sampolan A Mild di Kelangkaan Parok di Yogyakarta).

Penelitian pada bidang penelitian manajemennya

banyak melalui riset pada bidang tersebut dan juga terlibat

dalam aktivitas praktis industri penelitian di Yogyakarta.

Secara khusus karena tersebut dilakukan dengan menjadi

anggota Badan Pengawas Pendidikan Dasar yang berada

di bawah Persatuan Perusahaan Pendidikan Indonesia, Penda DIY.